

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara memiliki peran penting yaitu untuk menjaga, menjamin eksistensi, dan membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Di dalam suatu negara dengan wilayah yang luas dibutuhkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dapat tercapai apabila pemerintahan dapat menjamin kepentingan atau pelayanan publik secara seimbang yang melibatkan kerjasama antara negara, masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Salah satunya pemerintah daerah yang berperan mengelola sumber pendapatan, mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya pembangunan, mendapatkan sumber penerimaan lain sesuai undang-undang untuk percepatan pembangunan, mendapatkan transfer keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 25% namun pemerintah pusat berharap dana pendukung percepatan dapat dihasilkan dengan maksimal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing- masing daerah (Mardiasmo, 2018).

Efektivitas adalah suatu bentuk yang dicapai dari hasil kerja dengan target yang telah di rencanakan sebelumnya. Asas efektivitas adalah asas yang mengarah kepada tujuan yang tepat guna (UU Nomor 23 tahun 2014). Rasio efektivitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah

dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan berdasarkan potensi riil suatu daerah (Mardiasmo, 2018). Semakin besar realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin efektif.

Efisiensi merupakan pencapaian hasil program yang maksimal dengan penggunaan uang terendah untuk mencapai target tertentu. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output dari rencana yang sudah ada. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah definisi asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan negara agar mencapai hasil kerja terbaik. Rasio efisiensi yaitu rasio perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah yang di terima (Mardiasmo, 2018). Semakin kecil rasio efisiensi maka pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

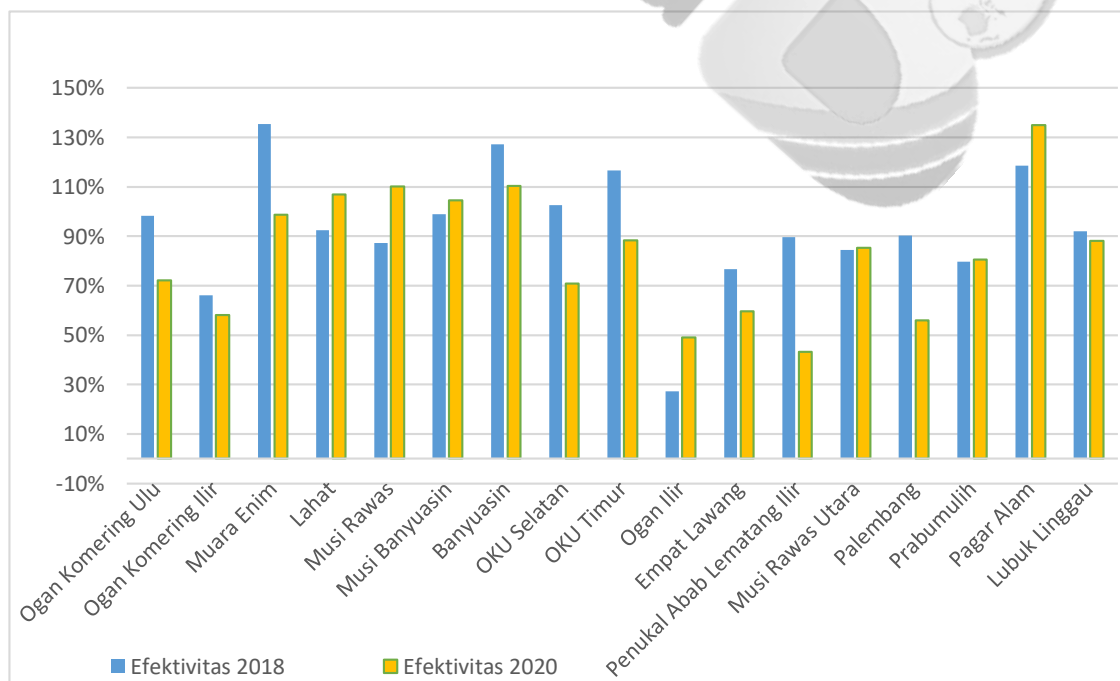
Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah (Mardiasmo, 2018). Semakin tinggi persentasenya, maka tingkat ketergantungan daerah dengan pihak eksternal semakin rendah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang di lakukan sesuai dengan efektif, efisien, dan mandiri harus dikerjakan secara optimal, karena berhubungan

dengan target dan realisasi penerimaan daerah. Namun, seringkali kejadian di lapangan tidak sesuai dengan target karena kurangnya dana pembangunan. Apabila pengelolaan keuangannya telah efektif, efisien, dan mandiri maka pembangunan akan terealisasi dengan baik. Jika pengelolaan keuangannya belum efektif, efisien, dan mandiri maka perlu perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan supaya pengelolaannya menjadi lebih baik dan ketersediaan dana untuk pembangunan agar terjaminnya kemandirian daerah.

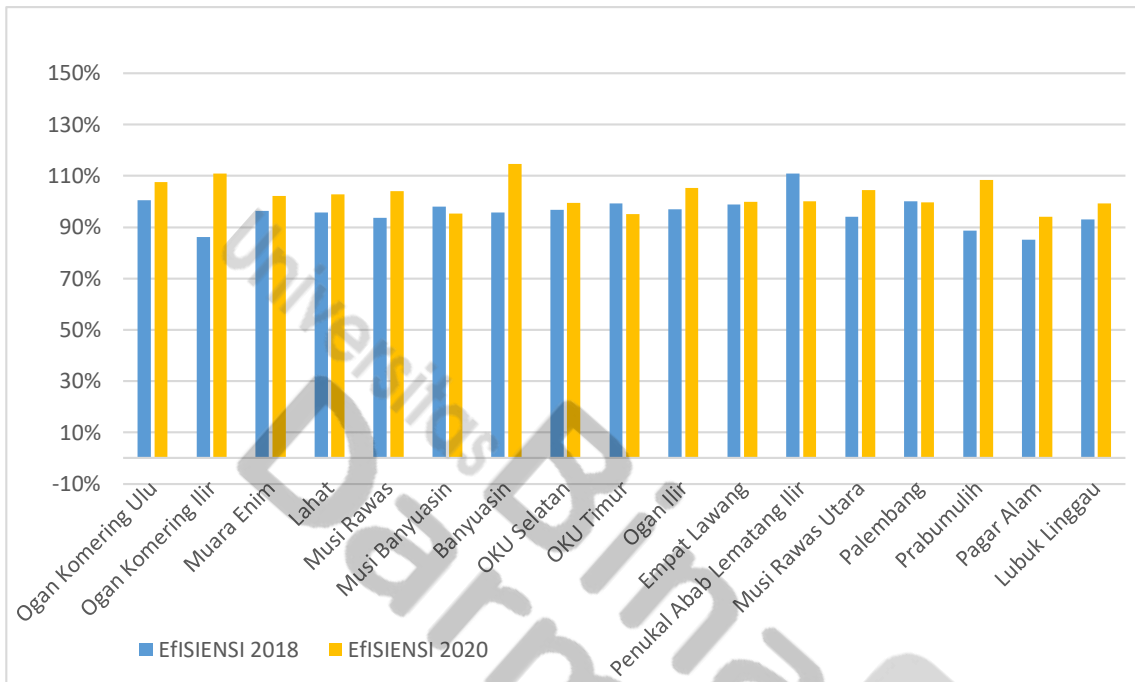
Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat sekitar maupun global. Selain di bidang kesehatan, pandemi juga berdampak terhadap bidang perekonomian termasuk di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat ditunjukkan pada grafik berikut.

Gambar 1-1. Grafik Perbandingan Efektivitas Kab/Kota Sumsel 2018 & 2020



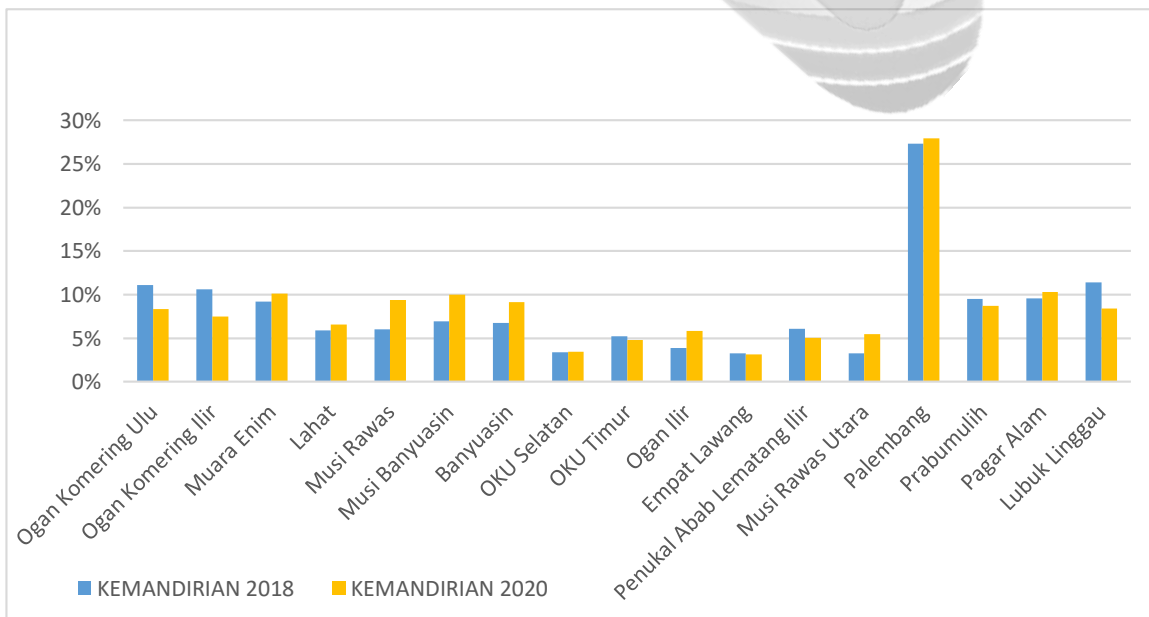
Sumber : Data diolah dari APBD Kab/Kota di Provinsi Sumsel Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Gambar 1-2. Grafik Perbandingan Efisiensi Kab/Kota Sumsel 2018 dan 2020



Sumber : Data diolah dari APBD Kab/Kota di Provinsi Sumsel Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Gambar 1-3. Grafik Rasio Kemandirian Kab/Kota Sumsel 2018 & 2020



Sumber : Data diolah dari APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Pada grafik diatas dapat dilihat, dari 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan terdapat 10 daerah yang mengalami penurunan efektivitas keuangan daerah. Kemudian, terdapat 13 daerah yang efisiensi keuangan daerahnya menurun. Untuk kemandirian keuangan daerah, terdapat 5 daerah yang mengalami penurunan.

Dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian di Indonesia menurut penelitian Yamali dan Putri (2020) yaitu :

1. Masalah PHK yang marak terjadi di perusahaan besar, 90% dicutikan pegawai dari pekerjaannya dan 10% pegawai di PHK.
2. *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufacturing menurun yaitu 45,3% di maret 2020.
3. Impor mengalami penurunan sebesar 3,7% di triwulan pertama 2020.
4. Adanya inflasi sampai 2,96% (yoy) dari harga emas da komoditas di maret 2020.
5. adanya penurunan di sektor penerbangan, pariwisata, perhotelan dan perdagangan sampai 50%.

Dalam penelitian Sayadi (2020) yang menyatakan bahwa kinerja pendapatan negara selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dengan penurunan realisasi sejumlah Rp. 323,16 triliun dari tahun 2019. Pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden Republik Indonesia no. 4 tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, *realokasi* anggaran, serta pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19.

Surat Edaran mengenai *refocussing* dan *realokasi* anggaran dari Kementerian/Lembaga untuk percepatan dalam penanganan COVID-19 agar dijalankan oleh setiap pemerintah daerah dengan maksimal serta dapat mengatur perekonomian di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk terhindar dari krisis ekonomi (Sholehien, 2022).

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan APBD tahun 2019-2021 (miliar Rupiah)

Uraian	2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PAD	6.881	1.072	16%	8.237	936	11%	8.412,76	1.172,50	13,94%
Pajak Daerah	4.989	720	14%	5.559	564	10%	5.468,61	898,61	16,43%
Retribusi Daerah	233	23	10%	248	28	11%	178,82	25,02	13,99%
Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	212	100	47%	255	117	46%	268,57	123,07	45,82%
Lain-lain PAD yang Sah	1.448	229	16%	2.175	226	10%	2.496,76	125,80	5,04%
PENDAPATAN TRANSFER	31.656	7.534	24%	31.074	4.878	16%	29.804,42	5.702,62	19,13%
Transfer Pusat- Dana Perimbangan	28.407	6.601	23%	28.511	4.756	17%	25.875,38	5.544,86	21,43%
DID dan Dana Penyesuaian	1.599	260	16%	1.046	0	0%	2.396,72	80,86	3,37%
Transfer Pemprov	1.542	673	44%	1.424	122	9%	1.508,78	76,90	5,10%
LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.450	263	11%	3.353	52	2%	1.457,65	2,22	0,15%
Hibah	777	1	0%	1.222	42	3%	765,67	2,22	0,29%
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan	107	0	0%	92	0	0%	272,23	0,00	0,00%
Pendapatan Lainnya	1.673	262	16%	2.131	9	0%	691,98	0,00	0,00%
TOTAL PENDAPATAN	40.986	8.869	22%	42.664	5.865	14%	39.923,51	6.877,34	17,23%

Sumber : Lingkup Pemda Provinsi Sumatera Selatan, Kajian Fiskal Regional (2021)

Dari tabel 1.1 dapat diperoleh informasi perbandingan antara realisasi pendapatan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019 total realisasi pendapatan daerah berjumlah Rp. 8,87 triliun, lalu sempat menurun drastis sebesar 5,86 triliun pada tahun 2020. Kemudian, meningkat kembali di tahun 2021 sebesar

Rp. 6,87 triliun. Penurunan realisasi pada pendapatan daerah tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi COVID-19. Pemulihan pendapatan pada tahun 2021 karena realisasi pendapatan transfer meningkat sebesar Rp. 0,82 triliun dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp. 5,70 triliun. Selanjutnya, realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu Rp. 936 miliar menjadi Rp. 1,17 triliun di tahun 2021.

Tabel 1.2. Realisasi Belanja APBD 2019-2021 (miliar Rp)

APBD Klasifikasi Ekonomi	2019			2020			2021		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Operasi	25.789	2.965	11%	27.745	3.199	12%	26.526,24	2.625,76	9,90%
Belanja Pegawai	12.828	1.971	15%	12.840	2.072	16%	12.717,47	2.053,02	16,14%
Belanja Barang dan Jasa	9.769	859	9%	10.745	879	8%	10.472,23	473,85	4,52%
Belanja Bunga	65	6	9%	68	8	11%	67,17	15,13	22,53%
Belanja Subsidi	66	9	14%	42	2	4%	30,03	0,00	0,00%
Belanja Hibah	2.061	79	4%	2.683	193	7%	2.518,29	30,86	1,23%
Belanja Bantuan Sosial	28	1	3%	344	37	11%	20,28	0,00	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan	981	40	4%	1.023	8	1%	700,76	52,89	7,55%
Belanja Modal	9.320	202	2%	9.282	105	1%	8.704,65	378,29	4,35%
Belanja Tanah	192	2	1%	184	1	0%	167,96	1,53	0,91%
Belanja Peralatan dan Mesin	1.467	61	4%	1.275	42	3%	1.157,65	13,57	1,17%
Belanja Gedung & Bangunan	1.611	18	1%	1.816	9	0%	1.875,44	36,75	1,96%
Belanja Jalan dan Jaringan	5.535	120	2%	5.242	52	1%	5.336,05	325,94	6,11%
Belanja Aset Tetap Lainnya	334	1	0%	377	0	0%	167,54	0,50	0,30%
Belanja Aset Lainnya	182	0	0%	388	0	0%	0	0	0%
Belanja Tak Terduga	129	1	1%	69	9	13%	304,75	0,17	0,06%
Transfer/ Bagi Hasil BantuanKab/Kota/Desa	6.167	1.272	21%	5.620	253	5%	6.170,35	117,18	1,90%
TOTAL	41.414	4.440	11%	42.717	3.565	8%	41.705,98	3.121,40	7,48%

Sumber : Lingkup Pemda Provinsi Sumatera Selatan, Kajian Fiskal Regional (2021)

Dari tabel 1.2. diatas menunjukkan perbandingan antara realisasi belanja APBD Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019 total realisasi belanja daerah sebesar Rp. 4,44 triliun, dan mengalami penurunan drastis tahun 2020 yaitu sebesar

Rp. 3,56 triliun. Lalu, menurun kembali di tahun 2021 mencapai 3,12 triliun. Penurunan total belanja keuangan daerah tahun 2021 bersumber dari belanja transfer yang realisasinya hanya 1,9 persen dari pagu Rp. 6,167 triliun, berbeda dengan periode 2020 dan 2019 mencapai 5 persen dan 21 persen. Kemudian, realisasi belanja operasi Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 9,90 persen dari pagu Rp. 26,53 triliun. Sedangkan, realisasi belanja modal tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai Rp. 378 miliar. Hal ini memiliki *multiplier effect* dalam jangka panjang untuk perekonomian Provinsi Sumatera Selatan di masa pandemi COVID-19.

Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional, terdapat tiga kebijakan yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi, dan ekspansi moneter. Pemerintah membentuk badan khusus untuk bekerja dengan pemulihan ekonomi yang disebut Satgas PEN 2021. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/ kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu pra kerja, pembebasan listrik, dan lain-lain.

Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/ stimulus kepada UMKM dan korporasi. Lalu dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan

stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Berdasarkan penelitian terdahulu Tarmizi, et al (2014) menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung setelah mendapatkan Opini WTP. Hal ini berarti kinerja keuangan pemkot Bandar Lampung mengalami perbaikan dari sebelum Opini WTP. Sama dengan penelitian yang dilakukan Fazlurahman, et al (2020) menyimpulkan pada kinerja keuangan pemerintah Kota Bandung setelah memperoleh opini WTP dari BPK mengalami perbaikan yang signifikan dari sebelumnya.

Berdasarkan penelitian Habibi, et al (2021) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada rasio kemandirian dan rasio solvabilitas operasional pemerintah daerah. Sedangkan rasio fleksibilitas, rasio solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan pemerintah daerah disimpulkan tidak mengalami perbedaan sebelum dan pada saat COVID-19.

Pada penelitian Rahmawati, et al (2022) menyatakan bahwa terdapat pada kinerja keuangan daerah pada 17 pemerintah Provinsi di Indonesia sebelum dan semasa COVID-19 pada rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio kontribusi pajak daerah pada PAD, dan rasio belanja modal. Sedangkan pada rasio derajat desentralisasi fisik, rasio kemandirian, dan rasio retribusi daerah pada PAD tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan Vebiani, et al. (2022) menyatakan tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat pada

saat COVID-19 mengalami perbaikan sebesar 0,003 dibandingkan sebelum COVID-19. Lalu, tingkat efisiensi keuangan pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbaikan sebesar 0,05 dibandingkan sebelumnya. Sedangkan, tingkat efektivitas keuangan mengalami penurunan sebesar 0,093 pada saat COVID-19 menjadi kurang efektif.

Penelitian ini merupakan replika dan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vebiani, et al (2022). Perbedaan di dalam penelitian ini terletak di tahun penelitian, metode penelitian, dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Vebiani, et al. (2022) meneliti pada periode tahun 2019-2020 di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 sedangkan penelitian ini meneliti pada periode tahun 2019-2022 di Kabupaten/ Kota Sumatera Selatan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Metode penelitian Vebiani, et al (2022) menggunakan deskriptif kuantitatif dan analisis inferensial sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji normalitas *Shapiro Wilk*, dan uji beda. Selain itu perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dan terjadinya ketimpangan fiskal di Palembang membuat peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi daerah yang mampu dioptimalkan sebagai sumber penerimaan daerah. Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dapat membawa dampak

positif bagi pertumbuhan daerah lainnya. Sehingga efektivitas, efisiensi, dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan dan perekonomian daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Tingkat Efektivitas, Efisiensi, dan Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan dalam permasalahan ini adalah Bagaimana analisis perbandingan tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian sesuai pembahasan tentang Perbandingan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022 dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemandirian pengelolaan keuangan

daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ada di pemerintahan khususnya pada Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan, yaitu agar penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran tentang pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, pembahasan yang terdapat pada bab saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Ada pun sistematika penulisannya sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan yang berisi sub-sub bab yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori-teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi, beberapa *literature review* yang berhubungan dengan penelitian, hipotesis penelitian serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum metode yang digunakan, data yang diperlukan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap masalah yang sedang diteliti, penyajian data penelitian, pengolahan terhadap data yang terkumpul dan hasil penelitian yang di capai.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan saran sebagai pemecahan masalah dan pencapaian yang lebih baik.